

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah dapat dipisahkan dari dunia. Dunia menanggapi masalah ini dengan menyepakati konferensi yang dihadiri 189 negara pada September 2000, menghasilkan Deklarasi yang dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs). Dalam pertemuan tersebut, semua negara yang berkepentingan menyepakati target pengurangan penduduk miskin sebesar 50% pada tahun 2015.<sup>1</sup> Kesepakatan dalam deklarasi ini menjadi bukti bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah terbesar yang harus ditangani bersama.

MDGs akan berakhir jika kita berhasil mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan hingga hampir setengahnya. Setelah berakhirnya MDGs, lahirlah Sustainable Development Goals (SDGs) pada pertemuan yang diadakan di Markas Besar PBB di New York, AS pada 25-27 September 2015. Ratifikasi dokumen SDGs adalah sebagai berikut: Itu diratifikasi pada konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara. Acara ini merupakan perpanjangan dari perjanjian dokumen SDGs yang berlangsung pada 2 Agustus 2015 di New York. Sebuah dokumen berjudul "Mengubah Dunia Kita: 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" atau "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" disahkan oleh 193 negara anggota PBB saat itu. Dalam dokumen SDGs diciptakan untuk melanjutkan serta memantapkan pencapaian dari program MDGs sebelumnya dengan tujuan program ini berlanjut hingga seterusnya.<sup>2</sup>

Program SDGs disepakati oleh pimpinan negara dan mereka memutuskan untuk berkomitmen untuk mewujudkan penghapusan masalah kemiskinan, masalah kelaparan, meningkatkan kualitas Kesehatan, meningkatkan tingkat pendidikan serta mengurangi ketimpangan social. Dalam pelaksanaan agenda ini diwujudkan dengan semangat bahwa tidak ada yang tertinggal dalam program ini pada tahun 2030. Pelaksanaan SDGs diikuti oleh 17 agenda yang telah disepakati dalam dokumen SDGs 2030. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa target tersebut direalisasikan dengan penjabaran agenda menjadi 169 target serta 241 indikator.

---

<sup>1</sup> "Sekilas SDGs," diakses pada 20 Agustus. [Sekilas SDGs 1 \(bappenas.go.id\)](http://bappenas.go.id)

<sup>2</sup> Muh Saleh, "Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)" Dec 5, 2019. [Dokumen Sustainable Development Goals \(SDGs\) \(slideshare.net\)](https://www.slideshare.net/)

Target dan tujuan dalam mencapai pembangunan dalam program ini memberikan gambaran bahwa progres dari adanya kemajuan pelaksanaan program tersebut dalam negeri atau antar negara, serta perbaikan strategi dan manajemen air dalam pengambilan Langkah mengatasi perubahan iklim. Program SDGs mencakup empat pilar yang sudah dijelaskan yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pilar lingkungan. Di antara empat pilar dan tujuan program SDGs terkait dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan SDGs merupakan lanjutan MDGs yang masih banyak memiliki tantangan. Garis kemiskinan yang ada masih sekitar 11%, dan mengalami penurunan dari angka sekitar 15% pada 20-30 tahun lalu menjadi 11.7% saat ini. Dengan hasil yang membaik dalam pelaksanaan program MDGs, didukung kebijakan publik disertai pendanaan yang baik dan fokus pada SDGs di bidang kesehatan dan pendidikan maka Indonesia dapat bekerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hal positif di seluruh wilayah Indonesia mendatang pada tahun 2030.<sup>3</sup>

Kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks di negara-negara berkembang. Masalah yang perlu segera diatasi karena merupakan masalah besar. Kesejahteraan yang tidak merata menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia yang diikuti oleh kesenjangan sosial yang masih tinggi. Adapun permasalahan kemiskinan lainnya diikuti oleh tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas SDM rendah, lapangan pekerjaan yang kurang serta hal-hal lain yang menjadikan kualitas SDM di negara tersebut menjadi rendah.

Pengurangan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan program pembangunan. Pembangunan ekonomi di Indonesia juga terhambat dikarenakan pendapatan yang rendah yang mengakibatkan permasalahan kemiskinan semakin bertambah. Merupakan program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada seperti pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan menjadi tolak ukur

---

<sup>3</sup> Dodi Ahmad Kurtubi, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial", March 2, 2018. <https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740-sustainable-development-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-oleh-dodi>

kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga, dan hal ini bisa dijadikan melihat kesejahteraan dalam sebuah wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Kebutuhan dasar yang tidak dapat terpenuhi merupakan sebuah kondisi kemiskinan. Anda bisa menyebutkan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, perumahan yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang dicapai masih rendah. Hal ini menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang buruk menjadikan tingkat produktivitas rendah, hal ini menyebabkan tingkat pendapatan mereka juga menjadi rendah. Jika suatu pendapatan rendah, maka mengakibatkan rendahnya tabungan serta investasi yang dimiliki. Hal ini tidak memiliki peluang dalam akumulasi modal dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Kemiskinan seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan jika tingkat kemakmuran ekonomi dari standar hidupnya tidak terpenuhi. Dari beberapa fenomena penyebab kemiskinan yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik garis bahwa siklus penyebab kemiskinan berputar, sehingga alur tersebut berpeluang turun terhadap keturunan mereka. Jika hal tersebut menjadi permasalahan yang berputar digarisnya, akan sulit untuk keluar dari garis kemiskinan melalui keturunan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki tingkat yang berbeda, hal ini disebabkan oleh faktor geografis disetiap daerahnya. Adapun hal lain yang mendukung perbedaan ini disebabkan oleh jumlah penduduknya. Di pulau jawa penduduk miskin terdapat 14,02 juta orang dari 26,5 juta orang di pulau jawa pada tahun 2021<sup>5</sup>. Hal ini disebabkan salah satunya oleh faktor pengangguran dan pendidikan yang tidak layak.

Program SDGs pada poin pertama adalah tanpa kemiskinan (*No Poverty*), sedangkan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang tak kunjung usai. Indonesia adalah negara dengan jutaan sumber daya alam yang kaya, namun kasus kemiskinan masih menjadi permasalahan utama didalamnya. Hal ini disebabkan oleh banyak generasi yang diciptakan tanpa mengenyam pendidikan dan kesehatan yang layak. Efek lain yang dihasilkan kemiskinan

---

<sup>4</sup> Ali Khomsah dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia,2015) [https://www.google.co.id/books/edition/Indikator\\_Kemiskinan\\_dan\\_Misklasifikasi/IDZD\\_DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=BUKu+tentang+kemiskinan&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Indikator_Kemiskinan_dan_Misklasifikasi/IDZD_DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=BUKu+tentang+kemiskinan&printsec=frontcover) hal 11

<sup>5</sup> “Pulau Jawa,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses pada 10 September, 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa>

membuat jutaan manusia tidak dapat mendapatkan kebutuhan yang layak dalam segi pangan, sandang, tempat tinggal. Program Pemerintah Berkelanjutan terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan serangkaian program untuk mengatasi masalah masyarakat miskin, karena masyarakat miskin dan anak terpinggirkan berhak diurus oleh negara (Pasal 34 UUD 1945 Republik Indonesia).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati agenda SDGs, hal ini ditunjukkan dengan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan program tersebut. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 diterbitkan sebagai salah satu komitmen yang ditunjukkan oleh Indonesia yang berisi tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan program SDGs yang dilakukan Indonesia menurutnya menjadi salah satu peta untuk menjadi Negara Maju. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Ayat 4 Perpres Tahun 2017 bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, yaitu dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan lima tahun untuk pelaksanaannya. Berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sejalan dengan tujuan nasional.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kudus sejalan dengan tujuan SDGs, dimana dalam Dinas Sosial di Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dengan memfokuskan permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor kesejahteraan sosial dikukuhkan sebagai bukti yang mendukung konsistensi pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGS 2019-2023 melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019. RAD telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Jawa Tengah meliputi daerah/kota.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Perpres No.59 Tahun 2017 Tentang SDGs dan Tindak Lanjutnya,” SDGsbappenas.go.id, diakses pada 20 Agustus, 2022. [Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDGs dan Tindak Lanjutnya | \(bappenas.go.id\)](https://www.bappenas.go.id/)

<sup>7</sup> Sholahudin Al Ayubi, dkk. “Pengarutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauan Aspek Tata Ruang dan Partisipasi Rakyat,” Jan 12,2020. <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/pengarutamaan-sdgs-dalam->

Visi pembangunan daerah diselaraskan dengan komitmen pengimplementasian SDGs di Provinsi Jawa Tengah secara penuh baik dalam tingkat provinsi atau Kota. Perumusan dokumen RAD yang dilakukan secara bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kudus merupakan bentuk kota melibatkan organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi merupakan bentuk pelaksanaan ditingkat daerah dan bukti komitmen pencapaian SDGs.

Hasil SDGs RAD Provisional Jawa Tengah 2019-2023 pertama adalah kondisi untuk mencapai dan menantang implementasi TBD daerah. Kedua, tujuan dan arah kebijakan untuk mencapai TBD daerah berupa arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Ketiga, tujuan dan arah kebijakan pencapaian TBD daerah menjadi pedoman dan acuan bagi organisasi daerah dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka pendek dan menengah untuk RAD TBD. untuk organisasi masyarakat; Universitas; kedermwanaan; Pengusaha; Pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TBD.<sup>8</sup>

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs bersama seluruh pihak yang terlibat merupakan program pelaksanaan untuk mempercepat dalam mengurangi angka kemiskinan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan masyarakat. Kemudian memberikan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Prioritas dari program pemerintah menyita perhatian semua orang dikarenakan mengusung prinsip gotong royong serta kerja sama dan komitmen yang jelas untuk mengurangi angka kemiskinan. Program utama yang diberikan kepada masyarakat adalah Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Provinsi Jawa Tengah masih terlibat dalam masalah kemiskinan termasuk Kota Kudus. Penduduk miskin Kudus tinggal di beberapa daerah pinggiran Kota dan beberapa penduduk yang tersebar di beberapa daerah dengan diidentifikasi pendapatan penduduk yang tidak memiliki upah yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya dilihat dari besar upah yang didapat tidak sebanding

---

[rencana-pembangunan-di-jawa-tengah-tinjauan-aspek-tata-ruang-dan-partisipasi-masyarakat](#)

<sup>8</sup> “Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023,” PPID Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 20 Agustus. [RAD SDGs 2019-2023 – PPID Jateng \(jatengprov.go.id\)](#)

dengan besarnya pengeluaran serta kebutuhan yang ditanggungnya. Hal ini menjadikan penyebab angka kemiskinan masih tinggi. Beberapa program pembangunan dari pemerintah sudah diterapkan di Kota Kudus hingga memiliki kemajuan dan perkembangan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun dari program-program yang dijalankan pemerintah belum memiliki strategi yang tepat sehingga target yang dituju belum kepada masyarakat paling miskin yang terlibat, hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan.

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Kudus**

Kemiskinan	Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus		
	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)	1.01	-	0.90
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Persen)	0.18	-	0.19
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	429666.00	450992.00	482806.00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	64.24	67.06	66060.00
Persentase Penduduk Miskin (persen)	7.31	7.60	7.41
Source Url: <a href="https://kuduskab.bps.go.id/indicator/23/95/1/penduduk-miskin-di-kabupaten-kudus.html">https://kuduskab.bps.go.id/indicator/23/95/1/penduduk-miskin-di-kabupaten-kudus.html</a> access Time: July 6, 2023, 9:36 pm			

Data jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 64,24 ribu jiwa dan ditahun 2021 sebanyak 67,06 ribu jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 66060,00 ribu jiwa. Dalam jumlah penduduk tersebut jika dipersentasekan pada tahun 2022 sebanyak 7,41% atau menurun dari tahun sebelumnya dari 7,60%. Garis kemiskinan naik ditahun 2021 menunjukkan 450992,00 menuju tahun 2022 yaitu 482806,00 namun angka kemiskinan di Kudus justru menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kudus menurun.

Dari profil kemiskinan, keterampilan yang digunakan dan sumber yang ada di wilayah Kudus, BPS menggunakan konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Pendekatan tersebut kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan kebutuhan lainnya diukur dari pengeluaran yang dikeluarkan. Perhitungan ini dihitung sebagai Headcount Index, yaitu rasio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk. Dari data profil kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019.

Kasus kemiskinan pada Kota Kudus bukan lagi menjadi kasus terbaru, kasus ini sudah menjadi pembahasan mendasar oleh Negara dan juga Pemerintah Daerah. Meskipun diantara kabupaten Eks-Karassidenan Pati, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang terendah dalam kasus jumlah kemiskinan. Meskipun seperti itu, kasus kemiskinan tetaplah menjadi kasus yang harus dibahas dengan serius karena mengingat program pemerintah mengenai SDGs dan menyangkut perkembangan Negara Indonesia. Dari sinilah peran Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Coodus untuk membahas masalah kemiskinan.

Kegiatan SDGs yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Kudus yang bisa dilihat dibawah ini:

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas yang dirancang khusus Presiden Joko Widodo dalam hal pelayanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah/ sederajat untuk keluarga miskin/tidak mampu. Program PIP juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi biaya pendidikan individu dan mencegah putus sekolah, dan memberikan dorongan untuk siswa-siswa yang telah putus sekolah agar mau melanjutkan pendidikannya disatuan pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada mereka pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Sehat (PISPK) merupakan program salah satu Puskesmas untuk menjangkau masyarakat sasaran dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan puskesmas ini dimaksudkan tidak hanya berdiam diri, puskesmas akan mendatangi masyarakat. Pelayanan ini dimaksudkan puskesmas tidak hanya melakukan pelayanan hanya didalam gedung saja, namun melakukan pelayanan dengan cara pendekatan keluarga dengan mendatanginya.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah ada sejak tahun 2007, namun tahun 2014 terjadi perubahan oleh WHO melalui program SDGs karena menggunakan standartnya. Keluarga Penerima Harapan (KPM) menerima bantuan sosial bersyarat dari Program Keluarga Harapan. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penanggulangan

kemiskinan. Di dunia Internasional penyebutan program perlindungan sosial disebut dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

Pada tahun 2016, Bantuan Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) digantikan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut menggunakan sistem perbankan yang menggunakan kartu elektronik yang diantarkan langsung ke rumah tangga sasaran. Bantuan ini disalurkan secara nontunai dalam bentuk bansos dan hibah. Bentuk dari program BPNT ini meliputi pelayanan dasar, jaminan sosial, perbadayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan awal dari bentuk penyaluran BPNT.

Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa banyak sekali program yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan program untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas, lembaga layanan sosial perlu mengetahui cara mengimplementasikan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berdasarkan kasus permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Kudus”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat uraian secara mendetail tentang ruang lingkup atau topik utama yang akan digali dalam penelitian. Sesuai judul, fokus penelitian dari penelitian ini adalah implementasi Program Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kudus untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs), dan penelitian ini akan fokus mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan.

Pengembangan fokus ini berarti peneliti akan melihat banyak hal, antara lain siapa penerima manfaat PKH dan apa yang dilakukan penerima PKH, dimana peneliti akan memfokuskan pada program ini dari sekian program SDGs yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut.:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui program keluarga harapan



- dalam mengurangi kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Kudus?
2. Apa yang melatarbelakangi sebuah keluarga ikut dalam Program Keluarga Harapan?
  3. Apakah kegiatan yang diikuti dalam Program Keluarga Harapan dapat membantu peserta dalam mengurangi kemiskinan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian akan bernilai jika memiliki tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui program keluarga harapan dalam mengurangi kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi sebuah keluarga ikut dalam Program Keluarga Harapan.
3. Untuk mengetahui kegiatan yang diikuti dalam Program Keluarga Harapan dapat membantu peserta dalam mengurangi kemiskinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut.:

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi pengetahuan ekonomi di bidang implementasi program pemerintah bagi penulis, dan khususnya memberikan gambaran seberapa besar dampak program tersebut melalui program Hope for Families. .Saya harap ada.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Pembaca

Kajian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya tentang peran Program Keluarga Harapan, dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya atau sebagai referensi penelitian dengan menambahkan isu-isu lain.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan ke depan, khususnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

## F. Sistematika Penulisan

Studi ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan ke depan, khususnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan disertai, halaman persetujuan pembimbingan disertai, halaman presentasi, pendahuluan, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi, meliputi:

Bagian ini berisi tentang ikhtisar lima bab, satu bab dan bab lainnya saling terkait karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan kerangka penulisan proposal.

#### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini diuraikan penelitian teoritis yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, latar penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian validasi data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini ditutup dengan menyajikan kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Bab ini ditutup dengan menyajikan kesimpulan dan saran.